KAJIAN HUKUM TENTANG PELUANG DAN KENDALA BISNIS DI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Oleh : Jusak Kereh¹

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus akan informasi apa pun kalaulah tidak ingin dikatakan sebagai "*info-junkies*". Bergulirnya reformasi semenjak tahun 1998 mendorong bergeraknya kebutuhan informasi ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali, dimana sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak "halal".

Terlebih dahulu Perlu dipahami, untuk mengidentifikasi variabel-variabel proses hukum yang memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang memungkinkan media mendorong tercapainya tujuan demokrasi. Ditemui beberapa faktor yang mengindikasikan dimungkinkan atau tidaknya media yang bebas dan independen dapat berkembang. Faktor-faktor dimaksud misalnya tingkat melek huruf, kepemimpinan politik, stabilitas, dan sifat lembaga yang memungkinkan dihasilkan dan didistribusikannya informasi. Unsur-unsur pokok dimaksud di atas, maka perlu pula dilengkapi unsur penting lainnya yaitu sistem hukum. Sistem hukum yang terdiri dari instrumen peraturan perundang-undangan, lembaga hukum dan budaya hukum.² Dalam struktur hukum akan terlihat lembaga pembentuk hukum seperti pengadilan, dewan perwakilan rakyat, dan badan-badan administrasi; substansi hukum adalah aturan, nama, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu; budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.³

Kehadiran undang-undang No 32 tahun 2002 oleh masyarakat dianggap membawa angin segar bagi industri penyiaran, kelompok pemilik modal yang berkeinginan mengembangkan usaha penyiaran. Sistem stasiun berjaringan yang dikembangkan membuka peluang kerjasama antara stasiun televisi yang menjadi induk jaringan sebagai kordinator penyiaran dengan stasiun televisi lokal yang berfungsi sebagai anggota jaringan, di samping itu sistem ini juga memberikan peluang bagi televisi lokal untuk lebih maju dan berdaya saing.

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Friedman mengemukakan bahwa Sistem Hukum mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana dimuat dalam Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Cet ke-1, Edisi ke-2, (Wishnu Basuki, penerjemah), PT Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8.

³ *Ibid.*

Permasalahannya semua keinginan ini tersandung dengan proses pemberian izin penyelenggaraan penyiaran, banyak lembaga penyiaran kebingungan mengurus izin penyelenggaraan penyiaran karena di samping terlalu banyak persyaratan dan *budget* yang tinggi, terdapat dua lembaga regulasi yaitu Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang masing-masing merasa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan ketentuan undang-undang.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, permasalahan dalam Jurnal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peluang bisnis lembaga penyiaran swasta dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 ?
2. Apakah yang menjadi kendala lembaga penyiaran swasta dalam pengembangan bisnis pasca deregulasi penyiaran tahun 2002 ?
3. Bagaimanakah keberadaan TV Lokal pasca deregulasi penyiaran 2002 ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Seperti yang diketahui bahwa "dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview".⁴ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan"⁵.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006, hal. 14.

D. PEMBAHASAN

1. Peluang Bisnis Lembaga Penyiaran Swasta Dengan Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002

Deregulasi kegiatan penyiaran di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor itu adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan pos dan telematika masyarakat pengguna jasa. Tantangan lainnya adalah konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan dan etika moral.

Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.

Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up* bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan

dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Sejak disahkannya tahun 2002, UU Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan)

adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang "Penyiaran" lahir dengan dua semangat utama, *pertama* pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. *Kedua* adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjangkauan.

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat undang-undang tersebut yakni adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu di mana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah (pada masa rezim Orde Baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terlihat dalam pasal 6 bahwa sistem yang dianut dalam industri pertelevisian sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 yaitu memakai sistem dengan bentuk siaran nasional dengan pola jaringan. Sistem ini memungkinkan orang untuk berinvestasi dalam industri televisi di tingkat lokal ke tingkat daerah, sebagaimana diketahui dengan terbukanya program televisi swasta, maka keinginan orang untuk mendirikan televisi di daerah cukup besar. Hal ini juga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengatur tentang desentralisasi di daerah.

Sistem politik yang demokratis seharusnya mengubah sistem media yang otoriter represif dan sentralistis ke arah demokratis dan desentralistis, hal inilah yang dikawatirkan terjadi karena perpindahan ke dalam dominasi segelintir pemodal dan pemilik stasiun televisi. Perpindahan ke sistem otoriter dan dominasi baru kelompok swasta sama bahayanya dengan dominasi negara. Inilah yang kita sebut jalan neoliberal.⁶

⁶ Amir Effendi Siregar. 2009. *Industri Televisi Kita*. www.google.com.

Namun dengan diberlakukannya UU. No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran maka tercipta **PELUANG BISNIS** bagi investor sebagai berikut :

- a. Investor Lokal dapat mendirikan TV Lokal yang dijamin dengan Undang-Undang.
- b. Investor TV Lokal dapat menjadi partner TV Swasta berskala Nasional
- c. Rumah-rumah produksi di daerah dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.
- d. Hak dari masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi lokal terkini dapat terjawab.

Masyarakat dapat mengumumkan /mempromosikan produk-produk dan hasil karyanya atau hal yang perlu diketahui khalayak ramai sesuai pasal 19 UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

2. Kendala Lembaga Penyiaran Swasta Dalam Pengembangan Bisnis Pasca Deregulasi Penyiaran Tahun 2002

Sistem penyiaran televisi di Indonesia diselenggarakan dalam sistem penyiaran nasional dimana negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.⁷

Dalam menyelenggarakan penyiaran diperlukan suatu spektrum frekuensi radio yaitu gelombang elektromagnetik yang merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar bantuan. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pasal 33 ayat 3 UUD¹⁹⁴⁵. Agar terciptanya satu sistem penyiaran nasional Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan dalam pasal 33 ayat 1, sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggara penyiaran.⁸

Beberapa ketentuan yang wajib diketahui serta wajib dipahami oleh lembaga penyiaran sebelum mengajukan permohonan izin penyelenggara penyiaran yaitu selain aturan-aturan perizinan yang diatur dalam Undang-Undang penanaman modal, undang-undang penyiaran dan peraturan pelaksanaannya kurang lebih 4 Peraturan Pemerintah dan 4 Keputusan KPI, juga undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya kurang lebih sebanyak 2 Peraturan Pemerintah dan 6 Keputusan Menteri.

⁷ Lihat pasal 6 Undang-Undang Penyiaran

⁸ Pasal 33 Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002.

Peraturan yang begitu banyak dan superketat ini yang merupakan rambu-rambu dalam menyelenggarakan penyiaran televisi, ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, terjadi saling berebutan kewenangan antar lembaga sehingga membingungkan investor yang ingin mengembangkan bisnis dalam bidang penyiaran. Terdapat dualisme Regulasi terkait izin penyelenggaraan penyiaran antara KPI dan Departemen Komunikasi dan Informasi.

Tahun 2005 bulan Maret Pemerintah Menerbitkan PP No 11/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, PP No. 12/2005 tentang Radio Republik Indonesia dan PP No 13/2005 tentang Televisi Republik Indonesia. Dari ketiga PP yang dikeluarkan ini salah satu isinya adalah mewajibkan lembaga penyiaran publik untuk mengantongi izin dari Departemen Komunikasi dan Informasi untuk dapat memulai siarannya. Di tahun 2005 bulan Agustus KPI menerbitkan Surat Keputusan KPI No 40/2005 dan No 41/2005 Tentang panduan pelaksanaan dan panduan procedure administrasi permohonan izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi.

Peraturan ini mewajibkan serta memberlakukan secara sama seluruh lembaga penyiaran baik yang *existing* maupun yang baru, untuk mengikuti semua proses perizinan (verifikasi administrasi, verifikasi factual, evaluasi dengar pendapat hingga forum rapat bersama). Pada Bulan November 2005 Pemerintah menerbitkan PP No 49/2005 tentang liputan penyiaran asing, PP NO. 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, PP No. 51/2005 tentang lembaga penyiaran Komunitas, PP No 52/2005 tentang lembaga penyiaran berlangganan yang mewajibkan lembaga penyiaran untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari Departemen Komunikasi dan Informasi.

Pada Tahun 2006 Departemen Komunikasi dan Informasi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 02/2006 tentang pelaporan keberadaan lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan. Dalam surat edaran ini Menteri hanya mewajibkan lembaga penyiaran yang baru untuk mengikuti proses perizinan di KPI sedangkan lembaga penyiaran *existing* hanya diwajibkan melaporkan keberadaannya untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran. Di Tahun 2006 KPI menerbitkan Peraturan KPI No 3/2006 Tentang Izin Penyelenggara Penyiaran. Aturan ini merupakan penyempurnaan SK KPI No 40 dan 41 tahun 2005. Dalam peraturan ini proses perizinan didesentralisasikan sehingga KPI di daerah bersama pemerintah daerah adalah pemegang otoritas di wilayahnya.

Masih pada tahun 2006 bulan Juni, Menteri Komunikasi dan Informasi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang tata cara penyesuaian izin penyelenggara penyiaran bagi Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin dari Ditjen Postel dan atau Departemen Penerangan. Peraturan ini merupakan

tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 02/2006. Pada bulan September Menteri Komunikasi dan Informasi kembali menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 24/2006 tentang format penyesuaian izin penyelenggara penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Peraturan ini adalah tindak lanjut peraturan sebelumnya untuk memproses penyesuaian izin bagi lembaga penyiaran *existing*.

Pada tahun 2007 Menteri Komunikasi dan Informasi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 08/2007 tentang tata cara perizinan dan penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran swasta. Peraturan ini khusus diberikan bagi lembaga penyiaran baru, dalam peraturan ini Departemen Komunikasi dan Informasi membatasi pengajuan izin bagi lembaga penyiaran baru dengan menetapkan standar ekonomi suatu daerah layanan siaran sebelum dibukanya kesempatan bagi lembaga penyiaran baru untuk mengajukan izin penyelenggara penyiaran. Hingga saat ini Departemen Komunikasi dan Informasi belum mengeluarkan standar ekonomi tersebut, untuk itu belum ada kesempatan izin baru yang dibuka untuk lembaga penyiaran.

Sengketa kewenangan penyelenggaraan penyiaran khususnya menyangkut izin penyelenggaraan penyiaran, bukan hanya terjadi antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Departemen Komunikasi dan Informasi tetapi juga terjadi antara sengketa kewenangan antara Pusat dan Daerah khususnya wewenang pemberian izin alokasi frekuensi.

Terbitnya PP No 38 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota khususnya bagian lampiran Y (Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika) menghapuskan kewenangan Pemerintah dalam mengatur dunia penyiaran dimasing-masing daerahnya dan kewenangan ini diserahkan kepada pemerintah pusat. PP No 38 tahun 2007 secara normatif, meletakkan tiga kriteria yang menjadi dasar pembagian urusan dan keserasian hubungan antar tingkatan atau antar susunan pemerintahan yaitu eksternalisasi, akuntabilitas dan efisiensi yang didalamnya mencerminkan prinsip subsidiaritas dan penguatan demokrasi local dengan tetap memperhatikan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan⁹.

Eksternalisasi, adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/Kota, apabila dampak bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintah Propinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

⁹ PP No 38 tahun 2007, pasal 4 ayat 1

Akuntabilitas, adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintah secara langsung hanya dialami secara local (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu propinsi, maka pemerintahan daerah propinsi yang bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut, dan apabila dampak dialami lebih dari satu propinsi dan/atau bersifat nasional maka pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintah yang memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintah daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintah daerah propinsi, maka diserahkan kepada pemerintah daerah propinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintah akan berdayaguna bila ditangani pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan pemerintah.¹⁰

Dalam sistem jaringan di mana tidak boleh ada stasiun yang bersiaran langsung secara nasional, stasiun lokal pasti bisa berkembang karena sejumlah kondisi. Pertama, dengan sistem afiliasi, mereka tidak harus mengeluarkan biaya tinggi untuk melahirkan sekian jam program setiap hari. Kedua, mereka akan memperoleh jatah *share* iklan yang harus dibagi oleh stasiun induk jaringan. Ketiga, karena mereka tidak mesti bersaing dengan stasiun nasional, mereka bisa menarik pengiklan lokal.

Namun yang menjadi KENDALA yang dialami investor di daerah sejak diberlakukannya UU. No. 32 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a. Perijinan masih tarik ulur antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Depkominfo, sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi Investor TV Lokal.
- b. TV Swasta Nasional yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 masih beroperasi sampai ke daerah dan memakai kanal-kanal di daerah yang seharusnya dikelola TV Lokal.
- c. Belum ada ketegasan dari regulator untuk menjalankan sesuai UU No. 32 tahun 2002, Khusus pasal 13 ayat dan pasal 20.

¹⁰ PP No 32 tahun 2007, lampiran Y

a) Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran,¹¹ kalimat ini secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, 'Hal-hal mengenai penyiaran' sendiri layaknya ditafsirkan sebagai komponen-komponen dalam system penyiaran yang harus memiliki prinsip dan tujuan masing-masing, sehingga KPI tidak hanya mengatur persoalan isi siaran tetapi juga terlibat aktif dalam pengaturan menuju sistem penyiaran yang sehat, dimana dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai wewenangnya :

1. menetapkan standar program siaran
2. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
3. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. memberikan saksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. melakukan kordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

b) Penyelenggara Jasa Penyiaran

Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, merumuskan penyelenggara jasa penyiaran televisi dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran¹². Terdapat empat lembaga penyiaran televisi terdiri atas empat klasifikasi yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan, yang kesemuanya berbentuk badan hukum Indonesia baik yang didirikan oleh perorangan maupun didirikan oleh pemerintah.

Izin penyiaran sebelumnya telah diubah menjadi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang didalamnya tidak hanya mencakup kelayakan teknis yang diwujudkan dalam Izin Sertifikasi Radio (ISR) tetapi juga kelayakan ekonomis, social serta kultural yang proses perizinannya melibatkan KPI. Dengan dasar ini banyak proses peizinan yang tidak berjalan dengan baik.

c) Keberadaan TV Lokal Pasca Deregulasi Penyiaran 2002

Pergerakan eksistensi stasiun dari pusat ke daerah, juga terjadi perubahan dominasi kepemilikan stasiun TV dari pengusaha metropolitan kelas atas ke kalangan pengusaha menengah di daerah, menunjukkan bahwa usaha stasiun TV cukup menjanjikan secara ekonomis. Karena kuncinya sebagaimana dikemukakan bahwa kesuksesan televisi dalam ekonomi keuangan tergantung pada kemampuannya untuk melayani dan mendorong kepentingan yang beragam, terlebih dalam neraca pembelanjaan iklan di

¹¹ Lihat pasal 7 Undang-Undang Penyiaran

¹² Pasal 3 ayat 3 UU Penyiaran.

Indonesia mencapai trilyun rupiah per tahun, sebuah nilai yang menjanjikan bagi usaha media penyiaran.

Kehadiran TV lokal memberikan kemungkinan bagi rumah-rumah produksi yang ada untuk memasok program-program televisi, juga mendorong pertumbuhan rumah-rumah produksi baru di tiap kota/kabupaten. Suatu peluang untuk membuka usaha baru dan lapangan kerja baru. Hal ini mempermudah stasiun TV lokal untuk mengisi program acaranya, tidak harus semua program acara merupakan *in house production*. Tentunya sangat berat dan tidak memungkinkan bagi TV lokal yang relatif baru berdiri mampu memenuhi semua jadwal acara, di sisi lain tentang keuangan juga menjadi kendala tersendiri bagi

TV lokal dalam membeli paket program dari rumah produksi, mengingat masih sedikitnya pengiklanan yang memanfaatkan TV lokal sebagai media promosi produk. Hingga tahun 2007, tercatat ada sekitar 100 (seratus) televisi lokal yang tersebar di penjuru tanah air. Seperti Cahaya TV Banten, Jak TV, O-Channel, Pasifik TV Sulawesi Utara, PAL TV, Aceh TV, Ambon TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hampir di tiap propinsi saat ini telah hadir televisi lokal.

Walaupun ada peluang juga kendala tapi semakin jelaslah bahwa eksistensi televisi lokal akhirnya menjadi solusi ataupun jawaban terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Televisi lokal merupakan kebutuhan masyarakat di daerah dalam proses menyeimbangkan informasi, termasuk untuk mengangkat kearifan lokal sebagai ciri yang kental dari masyarakat Indonesia.

E. PENUTUP

Sistem pengaturan di dalam industri penyiaran televisi diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional yang dikembangkan dengan pola jaringan terpadu dengan membentuk stasiun jaringan dan lokal. Hal itu sangat membuka peluang investasi khususnya untuk pengusaha di daerah namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini sistem berjaringan ini tidak pernah terealisasi, karena terhambat oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2002 yang tidak tegas dalam mengatur penyelenggaraan izin penyiaran kepada dua lembaga yaitu Komisi Penyiaran Indonesia dan Departemen Komunikasi. Hal ini jelas menghambat kreativitas investor atau pengusaha lokal untuk mendirikan stasiun televisi swasta di daerah sesuai dengan konteks Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang keterbukaan dan kepastian hukum untuk berinvestasi di bidang penyiaran televisi.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tidak harmonis dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 khususnya mengenai masalah perizinan. dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) harus melalui serangkaian persyaratan panjang dengan melalui dua lembaga KPI dan Depkominfo, sehingga

memerlukan biaya yang tinggi serta waktu yang lama, Untuk itu perlu dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan perizinan agar industri penyiaran televisi di daerah semakin meningkat. Ketika TV Swasta "Nasional" enggan atau "membangkang" mengalokasikan waktu siarannya untuk konten lokal, maka terjadi celah sebagai peluang bagi stasiun TV lokal di masing-masing daerah. TV Lokal dapat memanfaatkan ceruk pasar (pemirsa dan iklan lokal) untuk konten lokal yang enggan diisi oleh TV Swasta Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Seno Adji, Oemar., *Pers. Aspek Aspek Hukum*. Cetakan Kedua. Erlangga, Jakarta, 1997.
- Seno Adji. Indriyanto., *Kebebasan Pers - Tuntutan Kebebasan Absolut?*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan", 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, UI Press*, Jakarta, 1982, hal. 66.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006, hal. 14.

Sumber-Sumber Lain :

- <http://asiaaudiovisualrb09agisuseno.wordpress.com/sejarah-penyiaran-indonesia/>
- <http://gudangilmu-bloodyy.blogspot.com/2010/04/sejarah-media-dan-sejarah-hukum-media> Diposkan oleh Anita Kusuma Wardana.
- <http://www.prenadamedia.com/cat.php?perpage=10&kat=7&pos=10>
- Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002.